



**FAST RESPONSE**  
WWW.FR.N.CO.ID

# Musda KNPI di Hotel Youtefa, Ketua AMK Barru Sebut Itu Cacat Hukum

**Ir. ABDU SAMID - BARRU.FR.N.CO.ID**

Dec 30, 2024 - 19:09



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Periode 2015-2018 Gedung Pemuda DPP KNPI, Jln. H.R. Rasuna Said, Komplek GEMA, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Tanggal Penerimaan

: 10 Januari 2017

Nomor Pendaftaran

: IDM00616466

Etiket Merek

:



Fotocopy ini sesuai dengan aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris Jakarta, tanggal 21.07.2022

Notaris di Jakarta Barat

DR. K. AIRIZ NAZARUDDIN HALIM, S.H., S.P.N., M.H., B.K.

Pelindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 10 Januari 2027, dan jangka waktu pelindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

Ketua Angkatan Muda Ka'bah.

M. Syahrir. S.E yang biasa di sapa Bro jejen kaget mendengar ada Musda KNPI di Youtefa, 29/12/2024

Sangat menyayangkan adanya MUSDA KNPI Kab. Barru tanpa melalui RAPIMDA, ini jelas sudah melanggar ADART  
Terlebih lagi OKP yang hadir tidak korum

Ketua Angkatan Muda Ka'bah.

Menegaskan tetap ikut hasil RAPIMDA dan MUSDA yang di Ketua Oleh Bung

Edi. S.Psi. yang sudah memiliki legas stading SK, Kemenkumham dan sertifikat HAKI.

Saat awak media ketemu di cafe 70 baru mengatakan Soal adanya dualisme KNPI di baru itu tidak melarang tetapi yang bermusda itu kan OKP yang bergabung di KNPI dan sebelumnya wajib Rapimda bersama OKP yang ada," tutur jejen

( Irsam )